

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ~	ii
Kata Pengantar ~	iv
Pernyataan ~	vii
Daftar Bagan, Tabel dan Gambar ~	viii
Daftar Glosarium ~	ix
Daftar Isi ~	x
Abstrak ~	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ~	2
1.2. Rumusan Masalah ~	11
1.3. Tujuan Penelitian ~	12
1.4. Tinjauan Pustaka	
1.4.1. Aktor dan Gelombang Demokratisasi ~	13
1.4.2. Aktor dan Praktek Desentralisasi Lokal ~	20
1.4.3. Aktor dan Kontestasi Kebijakan Kota ~	29
1.4.4. Aktor dan Ruang Dinamika Kota Surakarta ~	42
1.5. Kerangka Teoritik ~	59
1.5.1. Kota dan Diskursus Struktur ~	59
1.5.2. Aktor dan Dualitas Struktur ~	67
1.6. Metode Penelitian ~	75

BAB II SURAKARTA, LATAR AKTOR DAN DINAMIKA KOTA

2.1. Gerak Kota di Perubahan Zaman ~	85
2.1.1. Kota dan Transisi Kemerdekaan ~	85
2.1.2. Tahap Awal, Transisi Struktur Kota ~	94
2.2. Orde Baru dan Pondasi Struktur Kota ~	100
2.2.1. Pilar Kebijakan Bagi Kota yang Teratur ~	100
2.2.2. Orde Pembangunan sebagai Aktor Tunggal ~	104
2.2.3. Kota dan Titik Akhir Kebijakan Sentralisasi ~	118
2.3. Dinamika Kota dan Akselerasi Perubahan ~	124
2.3.1. Kota dan Dinamika Aktor Politik Kota ~	124
2.3.2. Kota dan Kontestasi Kebijakan Publik ~	136
2.4. Catatan Refleksi ~	143

BAB III JEJARING MASYARAKAT SIPIL DAN KEPENTINGAN WARGA

- 3.1. Mei Kelabu dan Transisi Reformasi ~ 146
 - 3.1.1. Kota dan Ingatan Kerusuhan Mei 98 ~ 146
 - 3.1.2. Inisiasi Awal Implementasi Desentralisasi ~ 151
- 3.2. Inisiasi Partisipasi Warga, *Nguwongke Wong* ~ 162
 - 3.2.1. Pondasi Kebijakan Bersama Inisiasi Publik ~ 162
 - 3.2.2. Perencanaan Berbasis Musyawarah Warga ~ 167
- 3.3. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan Aktivasi Warga ~ 174
 - 3.3.1. Koalisi Strategis Warga untuk Kepentingan Publik ~ 174
 - 3.3.2. Konsolidasi Aktor dan Kelompok Marjinal ~ 187
- 3.4. Catatan Refleksi ~ 202

BAB IV ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL DAN KEBIJAKAN POPULIS

- 4.1. Pilkada 2005 dan Inklusi Pembangunan Kota ~ 206
 - 4.1.1. Kontestasi Aktor Kota di Pilkada Lokal ~ 206
 - 4.1.2. Afirmasi Isu dan Kebijakan Kelompok Marjinal ~ 212
- 4.2. Aktor dan Advokasi Kepentingan Masyarakat Sipil ~ 216
 - 4.2.1. Persoalan Publik dan Respon Kebijakan Kota ~ 216
 - 4.2.2. Tata Kelola Baru atas PKL dan Pasar ~ 220
- 4.3. Stuktur Kebijakan Melembagakan Populisme ~ 231
 - 4.3.1. Perda No. 8/2007 Jaminan Kesehatan bagi Warga ~ 231
 - 4.3.2. Perda No. 4/2010 Jaminan Pendidikan bagi Warga ~ 237
- 4.4. Catatan Refleksi ~ 247

BAB V JEJARING BISNIS DAN REORIENTASI KEPENTINGAN WISATA KOTA

- 5.1. Pilkada 2005 dan Pondasi Bisnis Pembangunan Kota ~ 250
 - 5.1.1. Akselerasi Kota Berbasis Kemitraan Bisnis ~ 250
 - 5.1.2. Jejaring Pebisnis Penyangga Ekonomi Wisata ~ 255
- 5.2. Mendaur Tradisi, *Solo The Spirit of Java* ~ 260
 - 5.2.1. Ruang Publik dan Media Promosi Kota ~ 260
 - 5.2.2. Jargon Kota, *Solo the Future is the Past* ~ 266
- 5.3. Konsolidasi Kota untuk Kemitraan Bisnis ~ 274
 - 5.3.1. Relasi Aktor Bisnis dan Strategi Wisata Kota ~ 274
 - 5.3.2. Kota dan Rangkaian Pagelaran Festival ~ 282
- 5.4. Catatan Refleksi ~ 294

BAB VI KONSOLIDASI BISNIS DAN LEGITIMASI KEBIJAKAN WISATA-MICE

- 6.1. Dinamika Politik Lokal dan Legitimasi Aktor Kota ~ 297
 - 6.1.1. Pilkada 2010 dan Sirkulasi Aktor Pasca Pilkada 2015 ~ 297
 - 6.1.2. Transisi Aktor dan Transisi Kota ~ 304
- 6.2. Konsolidasi Bisnis Kota dan Wisata MICE ~ 314
 - 6.2.1. Akselerasi Kebijakan Kota Berbasis Bisnis ~ 314
 - 6.2.2. Skema Investasi Kota dan Investasi Bersama ~ 320
- 6.3. Struktur Kebijakan Ekonomi Kota : *Solo for Sale* ~ 330
 - 6.3.1. Paket Kebijakan Afirmasi Wisata Kota ~ 330
 - 6.3.2. Jejaring Aktor untuk Ekonomi Kota ~ 339
- 6.4. Catatan Refleksi ~ 353

BAB VII DUA DEKADE KOTA: DEFISIT PUBLIK DAN DOMINASI BISNIS

- 7.1. Kesimpulan dan Refleksi ~ 356
 - 7.1.1. Sirkulasi Aktor dan Kontestasi Kepentingan ~ 360
 - 7.1.2. Konfigurasi Akhir Aktor dan Struktur Kota ~ 368
 - 7.1.3. Formula Akhir Kota dan Kepentingan Bisnis ~ 376
- 7.2. Implikasi Teoretik dan Rekomendasi ~ 382
 - 7.2.1. Defisitnya Ruang Publik Warga dan Kota ~ 384
 - 7.2.2. Kota dan Rapuhnya Praktek Demokrasi Elektoral ~ 388

DAFTAR PUSTAKA ~ 395